

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, pandangan mengenai hubungan internasional semakin meluas. Hal tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan aktor-aktor di luar negara yang dapat berpengaruh dalam hubungan internasional dan memudarnya lintas batas negara, namun juga isu-isu dalam hubungan internasional menjadi semakin variatif dan tidak hanya sebatas pada *high politic*, namun juga persoalan *low politic*, di antaranya seperti ekonomi, lingkungan, serta budaya. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai Jepang dalam mempertahankan *survival* negaranya dan melindungi kepentingan nasionalnya dalam ranah *low politic*, yakni dalam aspek ekonomi.

Jepang yang selama ini menjadi pemimpin dalam perekonomian di Asia harus mengalami *economic down turn*¹ selama lima belas tahun terakhir. Melemahnya perekonomian negara yang dikenal sebagai ‘Macan Asia’ tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, diantaranya adalah krisis terjadi pada tahun 2008 yang menyebabkan sejumlah negara *eurozone* di Eropa mengalami krisis yang berdampak pada krisis global. Selain itu, Jepang juga kalah bersaing dengan negara-negara di Asia Timur seperti China dan Korea dalam bidang industri.² Kondisi

¹ The Japan Times, “*Economic downturn continues*”, <http://www.japantimes.co.jp>. 18 november 2014

² Muhammad Abdi Amna, “*Kalah Bersaing, Toshiba & Panasonic Lighting Tutup Pabrik*”, industri.bisnis.com, 3 februari 2016.

Jepang yang kian memburuk membuat perekonomian Jepang pun semakin melemah dan mengalami resesi.

Di samping itu, krisis Jepang juga dipengaruhi oleh sejumlah permasalahan domestik yang secara tidak langsung sempat menggoncang perekonomian Jepang. Salah satunya adalah kebocoran pada fasilitas radioaktif PLTN Fukushima dan yang paling serius adalah terjadi pada tahun 2013³. Kebocoran fasilitas nuklir di Fukushima tidak hanya dikategorikan sebagai bencana nasional semata yang menuai kekhawatiran rakyat Jepang, namun bencana tersebut juga menjadi *international concern* yang menyebabkan adanya kekhawatiran akan adanya radiasi dalam produk-produk Jepang.

Sebagai respon atas kondisi perekonomian Jepang yang memburuk, Pemerintah Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe; Perdana Menteri Jepang yang terpilih untuk kedua kalinya pada 26 Desember tahun 2012, kemudian mengeluarkan kebijakan yang fokus kepada fisikal, moneter, serta pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk memperbaiki dampak dari resesi ekonomi global yang kemudian dikenal dengan '*Abenomics*'.⁴ Kebijakan moneter *Abenomics* tidak hanya menyebabkan sejumlah perbaikan dalam perekonomian Jepang seperti menurunnya angka pengangguran, dan meningkatnya infrastruktur dalam negeri. Namun *Abenomics* telah menyebabkan pada pelemahan mata uang Yen, sehingga jumlah wisatawan asing pun meningkat dikarenakan nilai tukar Yen menjadi lebih murah.

³ BBC Indonesia, "*Kebocoran lagi di reaktor nuklir Jepang*", www.bbc.com, 6 juni 2013.

⁴ Okezone.com, "*Kebijakan Abenomic Terbukti Ampuh Pulihkan Ekonomi Jepang*", <http://economy.okezone.com>, 22 april 2015.

Jepang kini menjadi destinasi wisata yang lebih murah bagi wisatawan asing, terutama bagi wisatawan Asia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Disamping itu, Pemerintah Jepang juga semakin *concern* terhadap sektor pariwisata, dan membahas mengenai isu serta prospek pariwisata di Jepang dalam pertemuan *ministerial council*. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Jepang juga menargetkan Jepang sebagai '*Tourism Oriented Country*' yang secara langsung dapat menarik perhatian wisatawan asing. Pariwisata merupakan salah satu kesuksesan dari kebijakan *Abenomics*.

Lonjakan pengunjung wisatawan manca negara juga menjadi sebuah tantangan tersendiri, sembari hal tersebut juga meningkatkan pendapatan nasional Negara Jepang. Pada hari senin, 22 Desember 2014 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jepang mencapai angka 13.000.000 orang untuk pertama kalinya.⁵ Jika melihat peningkatan kunjungan wisata manca negara ke Jepang, dapat diartikan bahwa akan ada banyak peluang-peluang lain yang akan terbangun secara otomatis, dan menjadi potensi politik dan ekonomi bagi negara Jepang sendiri. Di samping itu, sektor pariwisata sangat identik dengan jajanan atau makanan khas, pusat-pusat kerajinan dan oleh-oleh, serta peningkatan kebutuhan *home stay* untuk pengunjung. Hal ini akan menjadikan peluang dan juga strategi untuk meningkatkan perekonomian Jepang.

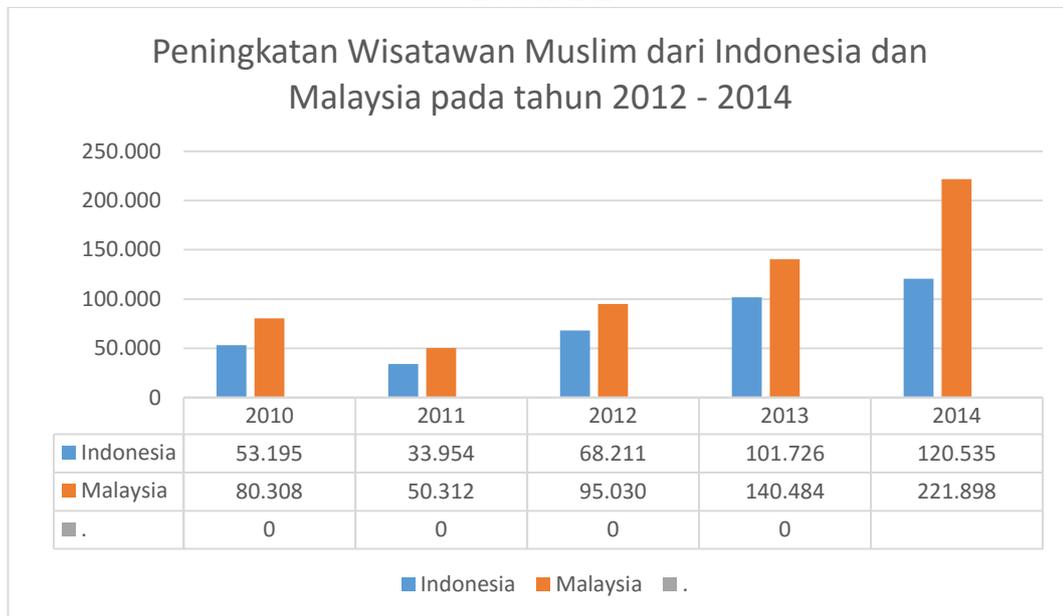
Secara etnik dan budaya, Jepang adalah negara yang homogen, dan hanya ada beberapa kelompok kecil minoritas. Suku *Yamato* adalah etnis asli yang dominan

⁵ Japan National tourism Organization., "*Wisatawan Mancanegara ke Jepang Capai 13 Juta Orang*". <http://www.jnto.or.id>. 2014. Diakses tanggal 13 desember 2015

di Jepang, sedangkan suku minoritas diantaranya adalah *Ainu*, *Okinawans*, *Burakunim*, dan *Korean*. Dari segi penganut agama, agama yang mendominasi adalah agama Shinto. Dengan kata lain, Jepang pada dasarnya bukanlah negara Muslim. Jepang merupakan rumah bagi 100.000 warga muslim, dan hanya sekitar 10% dari jumlah tersebut yang merupakan penduduk asli Jepang.

Wisatawan asing yang berasal dari berbagai negara, suku, budaya dan kebiasaan masing-masing negara, sudah menjadi hal yang pasti bagi Jepang akan perlunya untuk memenuhi kebutuhan khusus pengunjung lintas negara atau asing. Maka dari itu, sangat penting bagi Jepang untuk mempertimbangkan pemenuhan akan kebutuhan dan fasilitas khusus tersebut. Dapat terlihat dari jumlah wisatawan yang masuk ke Jepang dari beberapa negara Islam, atau berpenduduk mayoritas beragama Islam. Selain itu Jepang juga semakin meningkatkan kerjasama ekonomi dengan sejumlah negara-negara berpenduduk muslim, seperti Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia. Sebagai tolok ukur adanya peningkatan wisatawan muslim, dapat dilihat dari data statistik kedatangan wisatawan, berikut adalah data statistik wisata jepang mengenai kedatangan wisatawan dari negara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2012-2014:

Tabel 1.1



Sumber: *Japan Tourism Marketing*⁶

Tabel peningkatan wisatawan ke Jepang dari Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan oleh wisatawan muslim yang signifikan dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ke Jepang. Dengan demikian, walaupun jumlah ini terbilang jauh dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan asing dari negara lain non-muslim, akan tetapi adanya peningkatan ini memberikan dampak atau mempengaruhi permintaan terhadap keperluan yang mendasar, yaitu salah satunya adalah dalam hal ketersediaan makanan halal.

Dalam ajaran agama Islam, memilih makanan yang halal adalah sebuah keharusan, atau dalam kata lain, hukumnya wajib untuk memilih dan mengonsumsi

⁶ *Japan Tourism Marketing Co., "Historical Statistics – Visitors to Japan from Overseas". <http://www.tourism.jp/en/statistics/inbound>. 2012. diakses 8 maret 2016.*

makanan yang halal. Namun, berdasarkan hasil pengamatan empirik, sebagian besar makanan di Jepang yang ditemukan di sejumlah tempat pariwisata, rumah makan, serta pusat perbelanjaan merupakan makanan yang tidak halal. Menurut hasil wawancara dengan mahasiswa dari *University of Tsukuba*, kelangkaan makanan halal tersebut menjadi permasalahan bagi wisatawan maupun pendatang muslim, terutama karena sebagian besar wisatawan maupun pendatang tidak dapat mengidentifikasi *ingredients* karena minimnya pengetahuan mengenai Bahasa Jepang.

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan muslim, pada beberapa tahun ini, pengusaha-pengusaha Jepang mulai *concern* mengenai kebutuhan makanan halal dan fasilitas untuk wisatawan muslim di Jepang. Saat ini, mulai dapat ditemukan makanan yang berlabel halal di tempat – tempat tertentu, seperti contohnya salah satu supermarket di Jepang bernama *Gyomu Super*, di tempat ini menyediakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh kaum muslim.⁷ Selain itu di Bandara Internasional Jepang juga telah menyediakan tempat sholat dan juga makanan–makanan halal. Beberapa restoran di Jepang juga telah mulai dilabeli halal, sehingga memudahkan wisatawan untuk mengenal restoran yang menyediakan makanan halal.⁸ Hal ini sejalan dengan tujuan atau terget yang dinyatakan oleh

⁷ Sk. Nishat Abdullah-san, “*Supermarket Jepang bernama “Gyomu Super” menyediakan produk Halal untuk para Muslim*”. <http://www.halalmedia.jp>. 2015. Diakses 14 desember 2015.

⁸ Suyanti Suyanti, “*Jepang Mulai Melirik produk “HALAL”*”. <http://www.kompasiana.com>. 2015. Diakses 14 desember 2015.

pemerintah Jepang dalam memasang target pengunjung wisatawan mencapai 20.000.000 sampai disaat Tokyo menjadi tuan rumah olimpiade musim panas.⁹

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dibentuk rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Bagaimana kebijakan luar negeri Jepang dalam upaya mendukung serifikasi *halal foods* ?

C. Kerangka pemikir Proses Pengambilan Keputusan *David Easton*

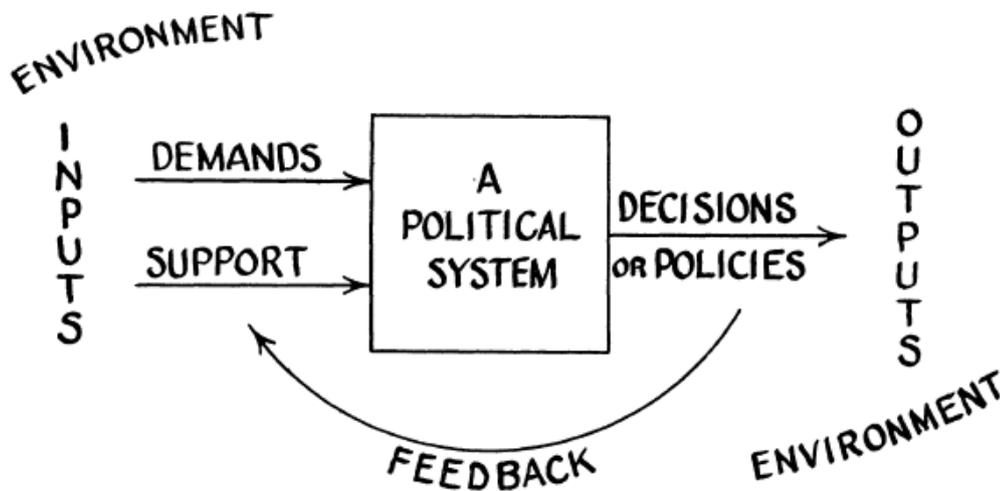
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan kerangka pemikiran proses pembuatan keputusan yang dijelaskan oleh David Easton. Dalam bukunya *The political system*, Easton menjelaskan bahwa teory yang dibuatnya ini merupakan jenis pendekatan alternatif dalam memahami jalannya atau langkah – langkah terbentuknya suatu kebijakan, atau dalam kata lain disebut sebagai kerangka konseptual tentang bekerjanya suatu sistem politik.¹⁰ Dalam studi politik ini, mengulas tentang bagaimana suatu kebijakan itu dibuat, dan pada akhirnya dieksekusi atau dijalankan untuk masyarakat. Dengan begitu, dapat mencoba memahami kehidupan politik melalui beberapa aspek, dan memeriksa jalannya suatu institusi seperti partai politik, kelompok kepentingan, pemerintah, dan juga pengambilan suara. Kerangka pemikiran ini dapat disajikan dalam suatu gambar,

⁹ Happy Amanda Amalia/PYA, “*Jepang akan Revisi Naik Target Pengunjung Asing di 2020*”<http://www.beritasatu.com/>. Selasa, 19 Januari 2016.

¹⁰ MOHTAR MAS’OED, “*Ilmu Hubungan Internasional-Disiplin dan Metodologi*”. LP3ES. Yogyakarta. 1990.

yang dimana dapat memudahkan proses analisis pembuatan kebijakan, sebagai berikut:

David Easton's diagram of the political system model



Source: *an approach to the analysis of political system (David Easton)*

Dalam mengidentifikasi sebuah sistem politik, kita harus dapat membedakan sistem politik dari sistem-sistem sosial lainnya melalui unit-unit dasarnya dan berbagai garis pembatasnya, karena dalam proses pembuatan kebijakan ini terdapat beberapa poin yaitu input, sistem politik, output, dan feedback-environment.¹¹

1. Input

Di dalam *input*, poin-poin yang terdapat didalamnya adalah tuntutan dan dukungan. Input-input inilah yang nantinya menjadi sebuah informasi yang

¹¹ Mohtar Mas' oed, Colin Mac Andrews. "Perbandingan Sistem Politik". GAJAHMADA UNIVERSITY PRESS. Yogyakarta. 2008.

akan di proses dalam sistem politik, dan juga memberikan dorongan agar sistem tetap berjalan. Input-input ini muncul dari kalangan masyarakat yang dimana sesungguhnya kemunculan itu diakibatkan karena adanya ketidak puasan terhadap hal-hal atau benda-benda yang dimana menjadi langka dan sulit untuk diraih atau dicapai. Hal inilah yang disebut dalam poin tuntutan, yang didalamnya terdiri dari lapisan masyarakat, dan tuntutan ini dapat menjadi input dalam sistem politik dengan jalan diorganisasikan secara khusus dan membentuk seperti pergaulan, organisasi buruh, atau organisasi-organisasi lainnya. Dan juga poin dukungan juga berperan untuk menjaga agar fungsi sistem ini tetap berjalan, karena disaat tuntutan ingin mempengaruhi proses-proses yang relevan, dibutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa kejadian yang menimpa Jepang, diantaranya adanya gempa bumi, disusul dengan tsunami, dan disebut-sebut mengakibatkan kerusakan pada reaktor nuklir, dan mengakibatkan kebocoran, sampai dimana Jepang dilanda resesi. Dari peristiwa-peristiwa ini berdampak pada kelancaran perekonomian Jepang, dan seperti data yang diterbitkan oleh *Tranding Economics*, memperlihatkan bahwa terdapat tanda kemerosotan perekonomian Jepang yang dilihat dari GDP Jepang. Pada tahun 2006 GDP Jepang berada pada angka 4356.75 (dalam hitungan USD-Billion), dan terjadi peningkatan pada tahun 2008 berada pada angka 4849.18, hingga pada puncaknya pada tahun 2012 yang dimana menyentuh angka 5954.48, dan pada tahun 2014 anjlok hingga 4601.46, sangat jauh dari pada tahun 2010-2012. Disini, terlihat bahwa ekonomi Jepang sedang mengalami penurunan. Dengan

adanya guncangan ekonomi seperti yang telah di gambarkan dalam grafik GDP Jepang diatas, Jepang memerlukan sumber *income* alternatif.

Jika dilihat dari sektor pariwisata, Jepang mempunyai prospek wisata yang bagus, tercatat dalam statistik wisata Jepang, bahwa pada tahun 2014 pengunjung atau wisatawan manca negara yang masuk ke Jepang mencapai angka 13.000.000. Hal ini memberikan angin segar sebagai langkah-langkah alternatif dimana saat Jepang mengalami penurunan ekonomi, dan pariwisata dapat memberikan suntikan dana untuk pemulihan dan *national income* Jepang.

Berbicara mengenai pariwisata Jepang, harus diingat bahwa terdapat kenaikan angka wisatawan dari negara yang dimana penduduknya mayoritas beragama Islam, itu berarti terdapat peningkatan wisatawan muslim ke Jepang. Disinilah dimana urgensi makanan halal untuk wisatawan muslim, dan *trend* saat ini terhadap halal foods yang sedang mengglobal, serta sebenarnya didukung dengan pernyataan dari Shinzo Abe Pemerintah Jepang (Perdana Menteri Jepang) yang sekarang mematok peningkatan wisatawan ke Jepang mencapai 20 juta, tetapi angka tersebut telah dicapai tahun lalu, dan target barunya adalah 30 juta wisatawan.¹² Hal ini seiring dibuatnya kebijakan yang lebih ramah terhadap pengunjung muslim yang dikenal dengan program *Muslim Friendly*.¹³

¹² Tourism-Review, "JAPAN WELCOMES MUSLIM TRAVELERS TO BOOST TOURISM". <http://m.tourism-review.com/japan-attracts-muslim-travelers--news4840>. 2015. Diakses pada 8 januari 2016.

¹³ RINDU P. HESTYA, "Japan Wants to Become Muslim-Friendly Country". <http://www.tempo.co/read/news/2014/09/30/074610863/japan-wants-to-become-muslim-friendly-country>. 2014. Diakses pada 8 januari 2016

2. *Political System*

Berdasarkan dari definisi David Easton, sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang dimana mempunyai peran untuk menjalankan alokasi nilai-nilai dalam bentuk keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bentuk alokasinya berupa tindakan otoritatif dan dikuatkan oleh kedudukan atau kekuasaan yang sah dan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Jadi, semua tindakan yang langsung berkaitan dengan pembuatan keputusan-keputusan yang mengikat masyarakat adalah termasuk dalam suatu sistem politik. Dalam sistem politik itu sendiri dipandang sebagai tempat dimana terjadi proses perubahan, yaitu dari *input* yang diruban menjadi *output*.¹⁴

Dalam bagian *political system* ini, terdapat kumpulan dari para pembuat keputusan yang didalamnya tergabung dari Pemerintah, Partai Politik, kelompok kepentingan, Parlemen, Birokrasi, dan Yuridiksi, atau sederhananya adalah para aktor – aktor pengambil keputusan.

Sistem politik Jepang menganut sistem monarki konstitusional, yang dimana mempunyai perlemen yang berbentuk bikameral, dan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan terdapat pengaruh yang

¹⁴ Mohtar Mas' oed, "*Ilmu HI Disiplin dan Metodologi*" hal. 105. LP3ES. Yogyakarta. 1990.

besar dan relasi yang kuat antara politisi, birokrasi dan juga kelompok pebisnis. Ketiga elemen itu sering disebut sebagai “*The Iron triangle*”.¹⁵ Birokrasi, di Jepang sangat berpengaruh, karena birokrasilah yang membuat kebijakan, dan birokrasi juga dikenal dekat dengan interest grup. Mereka ini berasal dari proses seleksi ketat yang dipilih dari universitas di Jepang yang mempunyai reputasi ternama. Jika di lihat secara kelembagaan, Perdana Menteri Jepang adalah kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang menentukan kebijakan politik dalam maupun luar negeri. Tetapi ketetapan “konstitusi jepang” menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif berada ditangan kabinet (bukan PM). Maka di Jepang, kabinet secara kolektif bertanggung jawab kepada kepada parlemen atau yang disebut DIET.

PM Jepang mempunyai sekretaris untuk membantu (ada 5 sekretaris):

- seorang kepala sekretaris kabinet
- tiga orang deputi sekretaris kabinet

Dari tokoh-tokoh diatas, yang paling penting dan berperan adalah Kepala Sekretaris Kabinet / *Chief Cabinet Secretary* (CCS). Dialah yang bertugas koordinasi mengenai penentuan kebijakan politik dalam dan luar negeri antara pihak pemerintah, partai politik yang sedang memerintah, dan pihak partai oposisi. CCS ini dibantu oleh tiga orang deputi (DCCS). DCCS ini dianggap sebagai jabatan paling tinggi di lingkungan birokrasi Jepang, karena mengurus administrasi. DCCS ini dipilih dari birokrat yang berkarir di kementerian dalam

¹⁵ Abdul Irsan, “*JEPANG Politik Domestik, Global dan Regional*”. Hasanuddin University Press. Makkasar. 2005.

negeri, perburuhan atau kesehatan, dan kesejahteraan. Jabatan DCCS untuk urusan politik biasanya dipilih dari parlemen, yang berfungsi untuk penghubung kantor PM dengan DIET (parlemen).

Dalam sehari-hari, PM dibantu oleh *Chief Secretary* yang bertindak sebagai sekretaris pribadi. CS membawahi empat *administrative secretary*:

- urusan keuangan
- masalah luar negeri
- perdagangan internasional dan Industri
- Kepolisian nasional

Mereka mengadakan kontak-kontak dengan politisi yang ada di Jepang dan konstituen di berbagai daerah, dimana hal ini juga dijadikan *Public Relations* bagi partai yang memerintah, dan PM. Mereka juga yang melakukan kontak-kontak teratur dengan berbagai kementerian dan lembaga penting seperti :

- Lembaga keuangan, perdagangan internasional, dan Industri (MITI)
- Lembaga luar negeri
- Lembaga kepolisian
- dll

Dan para sekretaris politik tersebut berasal dari birokrat yang memiliki tingkat jabatan sebagai kepala divisi, dan *deputy director jendral*.

Dilain pihak, dunia bisnis di Jepang merupakan aktor lain yang mempunyai kedudukan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi,

industri, dan perdagangan internasional. Dilingkungan bisnis ini ada dua kelompok besar :

- Gyokai : Mewakili sektor industri dan kepentingan-kepentingan lain seperti sektor perikanan, pertanian, dll. Dia juga merupakan kelompok lobby untuk memperjuangkan kepentingannya melalui kementerian-kementerian yang terkait.
- Zakai : merupakan organisasi induk kalangan bisnis seperti :

 - *Keindaren* = *federasi organisasi-organisasi ekonomi*
 - *Nissho* = *kamar dagang dan industri jepang*
 - *Keizai Doyukai* = *komite pembangunan ekonomi jepang*

Dari beberapa organisasi diatas, *Keidaren* adalah organisasi yang dekat hubungannya dengan tokoh-tokoh partai politik, untuk kebutuhan lobby. Elemen-elemen inilah yang saling membantu dan menguntungkan dengan tujuan perkembangan perekonomian Jepang yang semakin baik.¹⁶ Respon pemerintah dalam hal *halal foods* ditunjukkan dengan adanya *Japan Halal Summit 2014*, yang dimana didatangi oleh H.E Manabu Sakai the *Deputy Minister, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan*. H.E. Manabu merespon usaha dari *Halal Development Council (HDC)* yang

¹⁶ Angger Cahyaning Tyas Asih, "Skripsi SI UMY: " *PROTES JEPANG TERHADAP PEMBERLAKUAN UNDANG - UNDANG NOMER 4 TAHUN 2009 TENTANG MINERAL BATUBARA OLEH INDONESIA TAHUN 2014.*". HI 15 UMY 064. th.2015. Diakses pada 2 maret 2016.

sejalan dengan tujuan pemerintah Jepang untuk target angka 20 juta wisatawan ke Jepang.

Terlebih lagi dalam sistem politik Jepang terdapat perbedaan dengan sistem politik negara pada umumnya, terdapat *the public administration* yang dimana didalamnya adalah perwakilan organisasi, usahawan dan organisasi buruh. Mereka – mereka inilah yang banyak andil dalam pembuatan keputusan dan sangat berpengaruh di dalam lingkungan kabinet, serta juga pemecah masalah dalam negeri Jepang, dari pada politikusnya. Maka dari itu dalam rangka peningkatan ekonomi Jepang, peran pebisnis sangatlah menentukan terbentuknya suatu kebijakan. Dan juga peran dari MITI (Ministry of International Trade and Industry) sangat mempengaruhi dan cukup mempunyai *power* dalam hal ekonomi.¹⁷

Hal-hal diatas adalah kenampakan dari sistem politik yang ada di Jepang yang dimana populer dengan julukan *the iron triangle*. Namun, pola kajian dalam sistem politik tidak membahas proses pembuatan keputusan atau dalam bagian konversi, karena menurut Easton dan Elmond mengatakan bahwa proses ini dapat dipandang sebagai hal yang otomatis. Mereka hanya memandang *input* dan *output*-nya saja. Dengan demikian dalam analisis *input-output*, proses konversinya atau bagian *political sistem* di-*blackbox*-kan.¹⁸

¹⁷ Youtube, “*Japanese Political System*”. Diakses 2 maret 2016

¹⁸ Drs. Teuku May Rudi, S.H., MA., MIC., “*Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*”. ANGKASA Bandung. Bandung. 2009. Hal.106.

Dalam skripsi ini, yang dimana *halal foods* menjadi fenomena dan *trend* pasar saat ini, membuat pebisnis mengusahakan langkah pemerintah dalam strategi untuk meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata. Terdapat banyak *event* yang diadakan oleh banyak asosiasi pebisnis di Jepang, seperti contohnya HDC (Halal Development Council) yang mengadakan training untuk pebisnis, dan juga event Japan Halal Summit 2014.¹⁹

3. Output

Dalam poin ini disebut *output* atau hasil, yang dimana adalah hasil dari proses sistem politik yang telah berupa keputusan-keputusan atau kebijakan, atau tindakan pemerintah terhadap sebuah masalah dalam masyarakat.

Dalam usahanya meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata, Jepang mempunyai strategi kebijakan Jepang yaitu dengan tersedianya makanan halal dan membuat fasilitas - fasilitas yang dapat memudahkan wisatawan muslim di Jepang, salah satunya adalah sertifikasi halal untuk peningkatan ekonomi pariwisata. Tetsu Otsuru, direktur divisi kebijakan ekonomi untuk promosi Kerjasama pemerintah dan swasta dari Kementerian Luar Negeri, mengatakan bahwa pemerintah Jepang baru saja memulai proses sertifikasi halal.²⁰ Hal – hal tersebut adalah strategi Jepang dalam menjawab tantangan pasar dan usaha dalam peningkatan ekonomi dari sektor pariwisata nasional. Dan sekarang ini,

¹⁹ Halal Development Foundation Japan, HDFJ, “*Japan Halal Summit*”, <http://japanhalal-summit.jp>, 2014.

²⁰ Bernie Magkilat, “*Japan joins bandwagon to tap ‘halal’ food market*”. <http://www.mb.com.ph>. 14 feb 2016. Tokyo. Diakses pada 28 feb 2016.

di Jepang juga telah dibentuk MOU tentang kerjasama dibidang ekspor impor *halal foods*.

4. *Feedback and Environment*

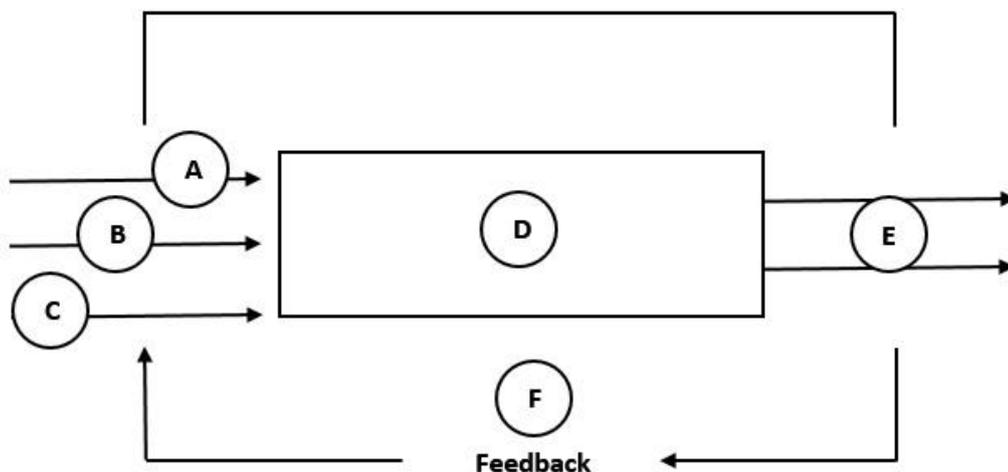
Poin ini adalah bentuk tanggapan (*feedback*) yang akan muncul dari lingkungan (*environment*) dan posisinya berada di luar batas sistem politik, tetapi masih dalam masyarakat yang sama.

Meningkatnya jumlah wisatawan ke Jepang juga karena hasil keputusan Jepang yang telah membuat kebijakan dalam pengelolaan sektor wisata Jepang. Di saat Jepang menghadapi wisatawan muslim yang kian meningkat seperti sekarang ini, penyediaan *halal foods* di Jepang memperoleh dampak atau reaksi atas kebijakannya, yaitu bertambahnya peluang untuk meningkatkan perekonomian Jepang melalui sektor wisata, terlebih dari negara-negara muslim dan wisatawan muslim, karena terciptanya rasa aman dan nyaman jika berwisata ke Jepang. Selain itu, mulai ada bahkan dikabarkan kabanyakan restoran di Jepang mengusahakan restorannya dalam pelayanan *halal foods* dan terhadap wisatawan muslim untuk mengembangkan usahanya²¹. *Feedback* ini nantinya juga akan naik menjadi input kembali, dan bisa saja dijadikan bahan perbaikan untuk kebijakan yang akan datang, dan begitu seterusnya.

²¹ Michiyo Ishida,, “*Japan's restaurants look to cater to the halal food industry*”. <http://www.channelnewsasia.com>. 03 Jan 2016.

Easton menjelaskan bahwa permintaan-permintaan warga negara adalah termasuk kedalam poin *input* yang dimana nantinya akan menjadi pertimbangan pemerintah atau para pembuat keputusan, dan keputusan yang dikeluarkan adalah poin *output* nya. Kebijakan atau *output* tersebut memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan politik, sosial dan ekonomi, bahkan kemungkinan warga negara bisa saja puas atau tidak puas dengan keputusan yang telah dihasilkan para pembuat kebijakan. Konsekuensinya, reaksi warga negara terhadap kebijakan tersebut menjadi *input* baru bagi pemerintah.²² Dan dalam kasus ini, dapat dilihat urutan pola kejadian, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Urutan pola kejadian dalam alur diagram sistem politik



²² MOHD AZIZUDDIN MOHD SANI, KNOCKS TAPIWA ZENGENI. "INTERNATIONAL RELATIONS" hlm. 130. PEARSON. 2014.

Keterangan :

1. Butir “A” adalah penurunan ekonomi Jepang.
2. Butir “B” adalah adanya peningkatan wisatawan muslim, dan munculnya kebutuhan wisatawan muslim dalam hal makanan halal.
3. Butir “C” adanya *trend* halal foods.
4. Butir “D” kepentingan pemerintah dalam ekonomi Jepang, (terdapat *The Iron Triangle*)
5. Butir ”E” adalah adanya sertifikasi halal.
6. Butir ”F” adalah munculnya upaya Pengusaha dalam mengembangkan ekonomi.

D. Hipotesa

Berdasarkan kerangka pemikiran serta analisis singkat, adapun kesimpulan sementara adalah sebagai berikut:

Dengan perekonomian Jepang yang mengalami penurunan, serta *demand* terhadap makanan halal yang merupakan efek dari adanya peningkatan jumlah wisatawan dari negeri muslim menyebabkan Jepang mengupayakan sertifikasi *halal foods* dalam rangka meningkatkan pariwisata.

Adapun kebijakan luar negeri Jepang untuk mendukung sertifikasi *halal foods* adalah dengan mengadakan kerjasama-kerjasama antar pihak dari negara-negara Islam atau lembaga sertifikasi halal. Dalam proses pembuatan

kebijakan tersebut juga melibatkan peran dari pemerintah atau lembaga suprastruktur di Jepang.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diinginkan melalui skripsi ini, antara lain adalah :

1. Mendapatkan pemahaman yang lebih sistematis dan melihat perilaku kebijakan Pemerintah Jepang dalam menanggapi isu yang sedang terjadi, serta mengetahui alasan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh pemerintah Jepang.
2. Menambah referensi keilmuan penulis tentang ilmu hubungan internasional.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup, waktu dan jangkauan penelitian yang menjadi objek penulisan, serta subjek penelitian itu sendiri guna memperjelas pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun subjek utama dalam penelitian ini adalah Jepang pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pengumpulan data, yang dimana dalam pengumpulan data dan fakta,

penulis menggunakan analisis muatan dengan penjelasan menggunakan metode kualitatif, sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder yang didapatkan dari buku pustaka ilmiah, sumber di internet, majalah, jurnal, dan sumber – sumber lainnya yang relevan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak dalam rangka memenuhi kaidah penulisan yang ilmiah. Oleh karena itu, skripsi “Kebijakan Negara Jepang Untuk Menerapkan Labelisasi Halal Foods sebagai Usaha dalam Memaksimalkan Sektor Pariwisata Nasional”, disusun secara sistematis menjadi lima bab, diantaranya adalah :

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, hipotesa, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini, akan membahas tentang dinamika perekonomian Jepang yang dimana dikenal dulunya sebagai macan Asia, dan mengalami kemerosotan ekonomi yang disebabkan beberapa faktor yang muncul dari dalam maupun luar negeri.

BAB III : Pembahasan akan berfokus pada peluang pengembangan ekonomi Jepang melalui sektor pariwisata nasional, disamping meningkatnya wisatawan muslim dan urgensi makanan halal yang muncul sebagai tuntutan pasar.

BAB IV : Merupakan bab yang menganalisa proses adanya keputusan untuk meningkatkan sektor pariwisata melalui sertifikasi halal.

BAB V : Kesimpulan